

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini menyajikan hasil temuan lapangan yang dianalisis berdasarkan teori stigma Erving Goffman. Fokus utama pembahasan terletak pada bagaimana masyarakat di Kota Bandung, khususnya di wilayah Kecamatan Andir, membentuk dan mempertahankan stigma sosial terhadap remaja yang terlibat dalam pekerjaan seks komersial (PSK). Selain itu, dibahas pula berbagai faktor yang melatarbelakangi keterlibatan remaja dalam pekerjaan ini, serta strategi pencegahan yang memungkinkan untuk mengurangi risiko keterlibatan mereka di masa depan.

Wilayah Kecamatan Andir terutama Jalan Saritem di Kelurahan Kebon Jeruk merupakan kawasan yang sejak lama dikenal sebagai salah satu titik aktivitas prostitusi di Kota Bandung. Saritem bukan sekadar ruang ekonomi informal, namun juga menjadi simbol sosial yang melekat kuat dalam benak masyarakat sebagai kawasan “lokalisasi”, tempat terjadinya interaksi kompleks antara pekerja seks, pelanggan, masyarakat sekitar, dan aparat. Dalam kawasan ini, dinamika stigma berlangsung sangat nyata: pelabelan, pengucilan, bahkan diskriminasi terhadap remaja PSK terjadi baik secara verbal maupun melalui sikap kolektif.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan emik dan etik. pendekatan emik diperoleh dari data melalui wawancara mendalam yang dicatat peneliti dengan apa adanya dari informasi narasumber. Proses yang narasumber alami dan membentuk pandangannya sendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. dan data emik pun dipakai melalui observasi di lapangan para narasumber

untuk menunjukkan bahwa stigma masyarakat terhadap PSK remaja muncul dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai agama, norma budaya, kondisi sosial-ekonomi, serta kebijakan hukum yang berlaku. Stigma tersebut kemudian berdampak luas terhadap kehidupan remaja PSK, terutama dalam aspek kesehatan, akses pendidikan, dan peluang untuk keluar dari dunia prostitusi.

Observasi dipakai untuk memungkinkan peneliti dapat paham bagaimana terbentuknya sebuah cara pandangan menjadi awal dari pembentukan stigma dengan melalui bab ini, peneliti menyusun secara komprehensif bagaimana stigma terbentuk dan berfungsi dalam masyarakat, serta bagaimana pendekatan kultural dan struktural dapat dimanfaatkan untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih inklusif dan berbasis empati terhadap remaja dalam situasi rentan. Pendekatan etik digunakan peneliti dalam menerjemahkan seluruh data lapangan dengan dorongan teori dan konsep yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, penelusuran terhadap faktor-faktor penyebab menunjukkan bahwa keterlibatan remaja dalam pekerjaan seks tidak bisa dilepaskan dari situasi struktural dan kultural yang saling berkaitan. yang dimana secara perlahan mendorong remaja khususnya perempuan ke dalam dunia prostitusi. Dalam konteks kawasan Saritem, Kecamatan Andir, Kota Bandung dalam pekerjaan ini tidak tunggal, melainkan kompleks dan berlapis. Faktor ekonomi ada dalam posisi paling tinggi dalam hampir semua kasus remaja PSK yang diwawancarai. Selain faktor ekonomi, lingkungan dan keretakan keluarga juga menjadi penyebab utama.

"Gapunya uang buat makan, awalnya dari situ. Tapi gakuat kalo dirumah bapak suka mukulin terus." PR, wawancara 7 Mei 2025.

Selain itu, informasi yang sama pun diberikan oleh informan JLT tentang alasan dirinya bisa bekerja menjadi pekerja seks komersial ini.

“Aku suka liat mamah dipukulin bapak, padahal mamah yang suka cari uang, akhirnya aku bantu mamah cari uang juga,” JLT, wawancara 7 Mei 2025.

Dapat dilihat bahwa faktor keterlibatan remaja dalam pekerjaan seks bukanlah akibat dari penyimpangan individu semata, tetapi hasil dari sistem sosial yang gagal melindungi mereka.

Setelah memahami faktor-faktor yang mendorong keterlibatan remaja dalam dunia pekerjaan seks komersial, pembahasan selanjutnya akan mengupas bagaimana masyarakat membentuk dan mempertahankan stigma terhadap PSK remaja melalui berbagai perspektif masyarakat.

4.1 Perspektif Masyarakat terhadap PSK Remaja

4.1.1 Perspektif Sosio-Ekonomi

Dalam perspektif ini, diperoleh informasi dari pelanggan dan warga sekitar dari pengalaman dan pandangan mereka. Pelanggan adalah laki-laki yang menggunakan jasa pekerja seks remaja. Sudut pandang yang mengacu terhadap bagaimana kondisi masyarakat seringkali mencerminkan kondisi ekonomi dan sosial yang mempengaruhi cara pandang individu terhadap kehidupan.

Dalam keseharian masyarakat di wilayah Saritem, pekerjaan seks komersial dipandang sebagai bagian dari realitas yang menggerakkan perekonomian di wilayah tersebut, di lokasi tersebut banyak ditemui warga yang membuka usaha warung atau ikut langsung dalam dunia

prostitusi sebagai calo, namun remaja yang terlibat dalamnya tetap dianggap "tidak tahu diri" karena melanggar norma usia dan moral.



Gambar 4.1 Gang menuju lokalisasi
(Sumber: Dokumentasi Azzahra Devla)

Informan T dan Y sebagai pelanggan memberikan sebuah pernyataan bahwa para remaja tersebut bukan memiliki keinginan sendiri untuk masuk ke ranah pekerja seks komersial tetapi didorong oleh latar belakang lingkungan.

"Sebetulnya saya juga kasihan lihat cewe masih pada muda. Tapi ya... mereka juga butuh uang. Ada yang sekolahnya enggak beres, orang tua cerai, terus malah dibiarin gitu aja. Ya akhirnya mereka cari duit sendiri, tapi jalannya begini." T, wawancara 10 Mei 2025.

Selain itu, informasi yang sama pun diberikan oleh informan Y tentang bagaimana ia memandang PSK Remaja

"Ya sebenarnya saya ga peduli mereka mau gimana yah alasannya sampai jadi kerja jadi psk begini, tapi kalo dilihat-lihat salah satunya pun karena keluarga faktor terdekat bikin mereka jadi tumbuh dengan pergaulan bebas." Y, wawancara 11 Mei 2025

"Tetapi selain itu, saya juga pernah nemuin yang menurut saya kasihan sih, karena mungkin mereka pernah mengalami kekerasan sama orang tua, ditekan untuk bantuin keluarga." lanjut Y, wawancara 11 Mei 2025

Sementara itu, salah satu warga memberikan informasi dengan pandangan yang berbeda

"Disini emang banyak cewe yang masih muda kecillah yang mondar-mandir malam-malam. Saya tahu mereka PSK. Tapi ya orang-orang bilang 'salah sendiri'. Dikiranya mereka nakal, padahal mungkin memang susah hidupnya." Ibu N, Wawancara 10 Mei 2025

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada empati, masyarakat tetap memaknai kemiskinan dan keterlibatan remaja dalam prostitusi sebagai kegagalan keluarga dan pribadi, bukan hanya sebagai dampak dari sistem sosial yang timpang. Ini membentuk stigma bahwa mereka adalah "anak nakal dari keluarga bermasalah."

4.1.2 Perspektif Hukum

Aparat pemerintahan yang memiliki pandangan yang bercampur antara pendekatan hukum dan keprihatinan sosial. Namun, dalam prakteknya, keberadaan PSK remaja sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum. Keputusan Wali Kota yang berkaitan dengan penertiban prostitusi, seperti Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 300/Kep.219-SatPol PP/2014 tentang Tim Yustisi Penertiban Prostitusi dan Administrasi Kependudukan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2014, dan Keputusan Walikota Nomor 300/Kep.380-SatPol.PP/2015 tentang Pembentukan Tim Yustisi Penertiban Prostitusi dan Administrasi Kependudukan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2015. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur dan menertibkan kegiatan prostitusi di Kota

Bandung, termasuk melalui pembentukan tim yustisi yang bertugas melakukan penertiban dan penegakan hukum terkait pelanggaran Perda.

Seorang petugas Satpol PP, Bapak Jenni menyatakan sering melakukan razia ke tempat remaja melakukan kegiatan prostitusi atas laporan dari masyarakat yang mengaku resah

“Kita sering lakukan razia dan memang beberapa kali kita temukan anak-anak di bawah umur. Tapi masalahnya, ketika bukan razia gabungan dengan dinas lain, enggak ada jaminan mereka enggak balik lagi. Jadi ya muter aja terus. Warga juga makin resah karena enggak ada perubahan.”
Bapak Jenni, wawancara 11 Mei 2025

Tetapi ada keibaan tersendiri dari petugas satpol PP ketika melakukan penertiban alasan dari para remaja memang kebanyakan adalah ekonomi dan susahnyanya lapangan pekerjaan.

“Kasian juga emang alasannya ekonomi, tapi memang lapangan pekerjaannya juga terbatas, makannya di palimanan tuh ada rehab yang buat latihan keterampilan.” Bapak Jenni, wawancara 11 Mei 2025

Dalam pandangan hukum ini, stigma muncul karena PSK remaja dipandang bukan sebagai korban, tetapi sebagai pelaku ketidaktertiban sosial, sehingga masyarakat merasa "berhak" untuk mengecap mereka negatif tetapi dihadapkan juga dengan kondisi sosial ekonomi yang sulit.

4.1.3 Perspektif Budaya

Dalam masyarakat Sunda yang masih memegang nilai-nilai adat dan kesopanan, keterlibatan remaja dalam pekerjaan seks dianggap mencoreng kehormatan pribadi, keluarga, bahkan kampung tempat

tinggalnya. Kehidupan yang berbeda membuat mereka juga dianggap anomali bagi masyarakat.

“Apalagi dengan kondisi seharusnya mereka hidup dalam kondisi normal. Karena kalo secara statistik bisa jadi psk adalah profesi yang anomali.” Bapak Rahmanto, wawancara 4 Mei 2025

Masyarakat setempat yang memiliki budaya malu atau “rasa isin” menjadi alat sosial untuk mengontrol perilaku anggota masyarakat.

Ketika remaja PSK dianggap melanggar norma kolektif ini.

“Warga sebrang yang udah ngeliat anak cewe keluyuran malem mah langsung bilang, pasti cewe yang jualan juga psk juga. soalnya keluar dari saritem gang situ” Ibu N, wawancara 10 Mei 2025

Mereka tidak hanya menerima stigma personal, tapi juga menciptakan tekanan sosial bagi lingkungannya. Stigma pun menjadi bentuk “hukum adat tak tertulis” yang dipakai masyarakat untuk menjaga citra moral mereka.



Gambar 4.2 Gambaran gang menuju lokalisasi
(Sumber: Dokumentasi Azzahra Devla)

Meskipun begitu, masyarakat kawasan Saritem terdapat pula tanda-tanda adaptasi budaya yang muncul secara perlahan. Beberapa

warga mulai menunjukkan sikap terbuka dalam memahami faktor-faktor struktural yang mendorong remaja terlibat dalam pekerjaan seks. Sikap ini tidak selalu berarti menerima atau membenarkan praktik tersebut, tetapi lebih kepada bentuk resistensi terhadap stigma yang terlalu keras dan mengarah pada pengucilan sosial.

“Kan kita juga semua udah sama-sama taulah disini tempat usaha, kita juga dapet buat makan dari sini akhirnya kita “mengerti” aja lah, paham gitu” Bapak B, wawancara 9 Mei 2025

Dalam beberapa kasus warga memilih untuk “menutup mata” atau tidak secara terbuka menghakimi, sebagai bentuk kompromi agar tidak terjadi konflik sosial yang lebih besar. Fenomena ini menunjukkan bawa budaya tidak sepenuhnya statis, tetapi dapat bertransformasi secara diam-diam dalam menghadapi realitas sosial yang kompleks.

4.1.4 Perspektif Agama

Lembaga keagamaan, khususnya pesantren yang berada persis bersebelahan dengan kawasan lokalisasi Saritem, memandang fenomena ini dari sisi pelanggaran syariat.



Gambar 4.3 Pesantren Daruttaubah
(Sumber: Dokumentasi Azzahra Devla)

Dalam Hukum Islam Prostitusi merupakan dosa besar sehingga tindakan prostitusi dilarang, larangan tersebut tercantum dalam Al-Quran surah Al-Isra '17: 32. Q.S An-Nisa; 24:33, QS An-Nur 24: 2. Tetapi ada juga kesadaran akan kompleksitas masalah remaja.

“Memang secara agama mah haram usaha gitu, terus disini dari cewe yang masih anak anak gitu muda pisan sampai ke yang tua juga ada, tapi memang remaja disini juga ada yang dulunya suka ikut ngaji.” Imran, wawancara 5 Mei 2025

Namun disisi lain, dalam realitasnya, remaja pekerja seks komersial masih memiliki kesadaran spiritualitas terhadap apa yang diterima dan apa yang diambil oleh tuhan. Mereka tetap menjalankan praktik-praktik keagamaan seperti syukuran, tahlilan dan pembacaan yasin di rumah tempat prostitusi berlangsung.

“Kita masih sering dipanggil untuk memimpin masalah tentang keagamaan, kaya kalo ada yang meninggal dimandiin dan disalatannya kadang di mesjid kita dan kita bantu. kalo ada syukuran pun ditempatnya kadang kita datang kadang ustadz juga minta di masjid, tapi masih kita bantu pimpin.” Imran, wawancara 5 Mei 2025

Dalam perspektif ini adanya dualitas dalam kehidupan yang dijalani remaja pekerja seks komersial. Di satu sisi, mereka tetap menjalankan aktivitas yang bertentangan dengan norma dan ajaran agama; namun di sisi lain, mereka tetap menunjukkan keterikatan terhadap nilai-nilai spiritual dan praktik keagamaan. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun berada dalam kondisi yang secara normatif dianggap menyimpang, mereka tetap mencari ruang untuk

menjalankan keyakinan dan mempertahankan hubungan dengan aspek-aspek spiritualitas dalam kehidupannya.

4.1.5 Perspektif Kesehatan

Tenaga kesehatan yang bekerja langsung dengan remaja PSK melihat bahwa stigma kesehatan muncul baik dari masyarakat maupun dari internal sistem layanan itu sendiri. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, setiap orang, termasuk PSK, berhak atas pelayanan kesehatan sistem reproduksi. Perlindungan hukum dan hak-hak sosial bagi PSK sangat penting untuk memastikan mereka dapat mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Remaja PSK sering dianggap sebagai sumber penularan penyakit, sehingga diperlakukan dengan prasangka. Profesi yang dianggap berbeda dari orang lain juga akan membuat pengaruh yang kuat untuk remaja mengalami masalah psikologis.

“Pandangan orang lain sangat berpengaruh, pada masa remaja, anak cenderung sedang mencari jati dirinya, emosi pun belum sepenuhnya stabil. Sehingga penilaian lingkungan bisa berdampak pada citra dirinya kelak.” Bapak Sani, wawancara 4 Mei 2025

Anggapan tentang mereka yang membawa penyakit juga tak jarang keluar dari perkataan tenaga kesehatan yang dimana seharusnya mereka membantu dalam pendampingan remaja pekerja seks komersial.

“Biasanya malah ga jarang mereka dianggap pembawa penyakit juga sama sesama tenaga kesehatan yang udah biasa kasih konsultasi” Rifqi, wawancara 4 Mei 2025.

“Masalah ini menambah alasan dari para remaja psk gamau balik lagi konsultasi, udah ga usah ditanya lagi kalo masalah mengakses layanan karena emang jarang dan sulit mencari rumah sakit atau klinik yang ramah terhadap pekerjaan seperti itu.” lanjut Rifqi, wawancara 4 Mei 2025

Pandangan kesehatan menegaskan bahwa stigma bukan hanya berasal dari masyarakat setempat tetapi dari tenaga kesehatan pun tidak bisa dipungkiri. Dan juga bukan berdampak pada perlakuan sosial saja, tetapi juga menggerogoti kesehatan mental dan memperburuk kondisi fisik mereka karena takut mengakses layanan yang seharusnya terbuka untuk semua.

4.2 Proses dan Bentuk Stigma Masyarakat terhadap PSK Remaja

Stigma terhadap remaja pekerja seks komersial di kawasan Saritem, Kecamatan Andir, tidak hanya hadir sebagai bentuk penolakan moral semata, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui berbagai proses sosial dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Proses ini berlangsung secara halus namun terus-menerus, dan muncul dalam bentuk pelabelan, diskriminasi, serta pengucilan yang terinternalisasi. Berdasarkan temuan lapangan, proses stigmatisasi terhadap PSK remaja dapat dijelaskan melalui lima perspektif masyarakat: sosial-ekonomi, hukum, budaya, agama, dan kesehatan.

4.2.1 Perspektif Sosio-Ekonomi: Stigma karena “Asal-Usul”

Dalam perspektif sosial-ekonomi, stigma muncul melalui proses pelabelan berdasarkan latar belakang keluarga dan kelas sosial. Masyarakat cenderung menghubungkan keterlibatan remaja dalam prostitusi dengan kemiskinan, pendidikan rendah, atau keluarga yang “tidak berhasil.” Pelabelan seperti “*anak jalanan,*” “*nakal,*” “*gagal dididik,*” muncul secara spontan dari warga sekitar. Proses ini berawal dari pengamatan masyarakat atas penampilan, perilaku, dan jam keluar-masuk remaja yang terlihat “mencurigakan.”

"Mereka ga heran, karena emang pergaulannya udah bebas, anak nakal, main malem cari uangnya ditempat kaya gitu jadinya" Ibu A, wawancara 13 Mei 2025

Bentuk stigma ini sering kali tidak diucapkan langsung ke orang yang bersangkutan, melainkan tersebar melalui gosip dan omongan warung, menciptakan jarak sosial yang nyata. Remaja dari latar belakang miskin dan tidak memiliki jaringan sosial yang kuat pun makin sulit membela dirinya.

"Bukannya gimana-gimana, kalo obrolan tentang anak anak cewe psk mah udah jadi bahan gosipnya ibu-ibu disini. merkanya juga biasa aja kalo denger" Ibu A, wawancara 13 Mei 2025

Stigma pun tetap bertahan karena terus direproduksi dalam percakapan sehari-hari yang berlangsung di ruang-ruang sosial. Meskipun dibungkus dalam nada bercanda atau sekedar obrolan ringan, pembahasan yang berulang ini memperkuat citra negatif terhadap remaja PSK.



Gambar 4.4 Warung tempat interaksi warga dan PSK remaja
(Sumber: Siti Hanifah, 2024)

Akibatnya, label sosial tersebut menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat, yang sulit dilawan atau dikoreksi oleh individu yang terdampak. Dalam jangka panjang, stigma ini tidak hanya menciptakan jarak sosial, tetapi juga menutup peluang remaja untuk dipandang sebagai individu yang masih bisa berubah atau diperjuangkan masa depannya.

4.2.2 Perspektif Hukum: Stigma sebagai “Perusak Ketertiban”

Dari sudut pandang hukum, proses stigmatisasi bermula dari tindakan represif seperti razia dan penertiban yang sering kali dilakukan tanpa pendekatan humanis. Masyarakat menyerap pola pikir bahwa PSK remaja adalah bagian dari gangguan ketertiban umum, bukan korban eksploitasi.

“Razia dimulai dari panggilan warga yang sudah mulai resah, bilanganya mereka pengganggu ketertiban masyarakat.” Bapak Jenni, wawancara 11 Mei 2025

Proses yang juga diperkuat melalui penggambaran PSK remaja sebagai kelompok yang berulang kali “dibina tapi tidak berubah”

aparatus sering menggunakan istilah seperti “*sulit dibina*”, “*bandel*” atau “*tidak bisa diarahkan*”.

“Karena kalo mereka udah tahu, gimana jalur penertiban setelah didata mereka akan dibalikan ke wali, atau udah kepalimanan buat dibina jadi tidak ada jaminan mereka untuk ga balik lagi. karena memang pada dasarnya juga mereka sulit dibina.” Bapak Jenni, wawancara 11 Mei 2025

Label ini memunculkan bentuk stigma dalam perlakuan yang keras, menciptakan sebuah stigma yang tidak hanya melekat dalam narasi masyarakat, tetapi juga dalam perlakuan aparat dan sistem. alih-alih melihat mereka sebagai korban eksploitasi seksual anak, pendekatan hukum justru sering mengedepankan penertiban sebagai solusi utama.

“Kalau misalnya ada penertiban juga kita dibawa, didata, ditelepon aja orangtua atau wali disuruh jemput. udah gitu aja berulang gaada yang gimana-gimana lagi, aku ma balik lagi aja.” PR, wawancara 7 Mei 2025

Dalam praktiknya, pendekatan hukum cenderung lebih menekankan pada pencitraan keamanan dan ketertiban publik ketimbang pemulihan atau perlindungan hak anak. Hal ini menciptakan siklus stigma yang berulang, dimana remaja PSK tidak hanya dikriminalisasi secara hukum, tetapi juga di marginalisasi dalam sistem yang seharusnya hadir untuk memberikan perlindungan.

4.2.3 Perspektif Budaya: Stigma sebagai “Aib Kolektif”

Nilai-nilai budaya masyarakat yang terutamanya adalah budaya sunda seperti kesopanan, rasa malu (*isin*), dan penghormatan terhadap keluarga tetap hidup dan menjadi acuan moral dalam kehidupan

sehari-hari. hal ini menciptakan kondisi paradoks, dimana praktik prostitusi menjadi bagian dari realitas sosial dan ekonomi, namun tetapi dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma adat. Ketika perempuan masih diketahui sebagai remaja, bukan hanya dirinya yang menerima stigma melainkan juga keluarganya, meskipun mereka tinggal di lingkungan yang secara terbuka mengakomodasi aktivitas tersebut.

“Iya emang saya juga tahu disini dari saya kecil misalnya ibunya jadi PSK terus lanjut jadi anaknya, tapi masa anaknya dari masih muda banget udah dibolehin jadi psk, paling lulus SMA mah berapa tahun 17-18 tahun, semua keluarganya udah rusak.” Ibu A, 13 Mei 2025

Stigma ini bukan lagi datang dari luar kampung, tetapi muncul dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat sekitar menggunakan narasi-narasi moral seperti “anak gadis harus bisa jaga diri” sebagai cara untuk menjaga batas-batas etika di tengah situasi yang penuh ambiguitas. Bentuk pengucilan sosial tetap terjadi, terutama terhadap keluarga yang dianggap gagal “menjaga anak perempuan”, meskipun sebagian besar warga sudah terbiasa dengan keberadaan praktik prostitusi di sekitar mereka.

“Resiko jadi yang gini banyak sampe keluarga dianggap gabisa ngurus aku juga banyak, tapi bukan gitu aja sih karena emang gaada buat makan juga lebih susah daripada denger omongan orang” BG, wawancara 6 Mei 2025

Inilah yang disebut dengan aib kolektif sebuah kondisi dimana beban moral atas pelanggaran norma budaya tidak ditanggung sendiri

oleh pelaku, melainkan juga oleh orang tua, saudara atau bahkan keluarga.

4.2.4 Perspektif Agama: Stigma “Moral dan Spiritual”

Konteks agama, stigma muncul dari label dosa dan penyimpangan akhlak. Proses stigmatisasi terjadi ketika remaja PSK dianggap melanggar nilai-nilai kesucian tubuh dan agama. Penghakiman moral sering muncul dalam bentuk pengucapan langsung maupun pembatas akses pada kegiatan keagamaan.

“Waktu itu mengundang pak ustadz untuk memimpin acara syukuran tapi pak ustadnya kurang mau kali pengajiannya di rumah minta di mesjid”
JLT, wawancara 7 Mei 2025

Beberapa warga mengaku bahwa jika remaja tersebut datang ke pengajian, mereka merasa "tidak nyaman" atau "membawa aib."

“Betul mereka sering mengadakan pengajian tetapi kadang ustadz ngomong kurang nyaman kalo diajak ikut pengajian ke rumah mereka atau ada mereka. akhirnya pengajian dimesjid kita” Imran, wawancara 5 Mei 2025

“Iya kadang ada ibu bapak dari anak murid yang bilang gamau disatuin sama anak dari warga sini atau dari anak anak psk ketika belajarnya, takut bawa pengaruh ga baik.” lanjut Imran, wawancara 5 Mei 2025

Bentuk stigma keagamaan juga tampak dari perlakuan spiritual, mereka dianggap belum layak tobat dan belum bisa ikut ibadah berjamaah. Ini memuat remaja PSK merasa semakin jauh dari ruang religius yang seharusnya menjadi ruang pemulihan.

4.2.5 Perspektif Kesehatan: Stigma sebagai “Sumber Penyakit”

Stigma dalam bidang kesehatan muncul dari anggapan bahwa PSK remaja adalah pembawa penyakit seksual. Proses ini diperkuat oleh cara petugas kesehatan memperlakukan mereka, meski tidak selalu dengan niat buruk, tetapi sering mencerminkan ketakutan dan jarak profesional.

“Kadang temen-temen nanganinnya secara setengah-setengah gitu karena ketakutan sendiri” Bapak Rifqi, wawancara 4 Mei 2025

Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu PSK remaja yang mendapatkan layanan buruk ketika melakukan pemeriksaan kesehatan.

“Kalo aku lagi mau periksa suka ditanya kerja apa, setelah tau aku PSK langsung buru buru cuci tangan. kaya saya bawa penyakit aja gitu mereka ketakutan” BG, wawancara 6 Mei 2025

“Akhirnya kalo ada pemeriksaan dari klinik terdekat juga saya menghindar, karena masih kebayang dokter waktu itu kaya najis liat saya gitu, cuci tangan terus.” lanjut BG, wawancara 6 Mei 2025

Akhirnya bentuk stigma ini muncul dalam bentuk pengabaian pelayanan, pembatasan informasi, atau perlakuan tidak ramah. Akibatnya, remaja PSK menyembunyikan identitas, menghindari pemeriksaan, dan lebih rentan terhadap infeksi yang tidak terobati.

4.3 Peran dan Dampak Strategi Pencegahan terhadap PSK Remaja

Upaya pencegahan keterlibatan remaja dalam pekerjaan seks komersial di Kota Bandung, khususnya di kawasan Saritem, telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara formal oleh pemerintah dan lembaga kesehatan,

maupun secara informal oleh tokoh masyarakat, agama, dan komunitas. Strategi-strategi ini mencerminkan kesadaran kolektif bahwa keterlibatan remaja dalam prostitusi bukan hanya masalah moral pribadi, tetapi juga persoalan struktural yang membutuhkan penanganan lintas sektor.

Beberapa bentuk strategi pencegahan yang ditemukan di lapangan mencakup edukasi kesehatan reproduksi, konseling psikososial, pemberdayaan ekonomi remaja, razia dan penertiban dari aparat, serta pendekatan keagamaan yang mendorong taubat dan reintegrasi sosial. Di salah satu klinik mitra PKBI, tenaga kesehatan aktif memberikan layanan konseling dan pemeriksaan gratis bagi remaja yang bekerja di sektor pekerja seks komersial.

“Pencegahan terbaik bukan hanya menyuruh mereka berhenti, tapi membuat mereka punya pilihan. Ketika remaja ini tahu bahwa mereka bisa kembali dengan kehidupan sosialnya.” Rifqi, wawancara 4 Mei 2025



Gambar 4.5 Ruang tunggu Klinik Pratama Mawar PKBI Kota Bandung
(Sumber: Dokumentasi Azzahra Devla)

Disisi lain, beberapa inisiatif komunitas lokal telah berperan penting dalam menciptakan ruang aman dan edukatif. Seorang pengurus pesantren di wilayah Andir menyampaikan bahwa mereka membuka program bimbingan spiritual bagi remaja perempuan yang “terlantar” dan “terjerumus,” dengan pendekatan tidak menghakimi.

“Kita gabisa buat bikin mereka balik ke jalan yang bener dengan cara yang keras, dengan cara kita masih mau untuk melayani mereka soal urusan agama pun, seperti mengajar mengaji dan tahlilan di tempat usaha mereka.” Imran, wawancara 4 Mei 2025

Namun, efektivitas strategi ini masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah ketidaksinambungan program dan tidak adanya pendampingan jangka panjang. Aparat yang sering melakukan penertiban menyampaikan bahwa:

“Kami hanya bisa menertibkan. setelah itu memang jika lebih jauh kami serahkan ke dinas yang terkait, yang terlibat dalam operasi gabungan.” Bapak Jenni, wawancara 11 Mei 2025

Meski berbagai strategi telah dijalankan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada pendekatan yang digunakan. Strategi yang berbasis hukuman, seperti razia atau pemaksaan rehabilitasi, justru sering memperkuat trauma dan memperdalam stigma. Sebaliknya, strategi yang menempatkan remaja sebagai subjek yang didengarkan dan diberdayakan terbukti lebih berkelanjutan.

Sayangnya, masih terdapat kesenjangan koordinasi antar lembaga, baik dari sisi pemerintah, pelayanan kesehatan, maupun lembaga keagamaan dan pendidikan. Banyak program pencegahan berjalan sendiri-sendiri, tanpa integrasi yang kuat atau pemetaan yang tepat terhadap kebutuhan remaja di masing-masing lingkungan. Akibatnya, remaja yang ingin keluar dari

pekerjaan seks tidak memiliki jalur pemulihan yang jelas, dan sering kembali ke kondisi semula karena tekanan ekonomi dan sosial.

Selain itu, upaya pencegahan juga sering terhambat oleh resistensi masyarakat itu sendiri. Banyak warga yang menuntut penghapusan lokalisasi, tetapi enggan menerima mantan PSK remaja kembali ke lingkungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan tidak cukup hanya berfokus pada individu, tetapi harus menyentuh kesadaran kolektif masyarakat agar stigma dapat diluruhkan.

Dalam pengamatan peneliti, beberapa pendekatan berbasis budaya dan komunitas menunjukkan potensi besar. Misalnya, adanya diskusi kelompok warga dapat membuka ruang empati dan dialog. Tokoh masyarakat dan agama yang mengubah pendekatan dari penghakiman menjadi pendampingan, memiliki pengaruh signifikan dalam menumbuhkan penerimaan sosial terhadap anak-anak yang ingin berubah. Strategi pencegahan yang ideal lainnya adalah strategi yang bersifat transformatif tidak hanya menasar perilaku remaja, tetapi juga menentang norma sosial yang diskriminatif, membuka ruang alternatif untuk ekspresi identitas, dan memperluas pemahaman masyarakat tentang kerentanan struktural yang dialami kelompok marginal.

Dengan demikian, dampak jangka panjang dari strategi pencegahan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat bersedia mengubah cara pandang mereka: dari sekadar melihat PSK remaja sebagai “masalah

sosial”, menjadi memahami mereka sebagai “produk dari kondisi sosial” yang membutuhkan dukungan, bukan penghakiman. Strategi yang berhasil adalah strategi yang tidak hanya menyelamatkan remaja dari dunia prostitusi, tetapi juga mengembalikan mereka ke ruang sosial yang menerima dan memberi kesempatan

